

**PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PT. GPI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oktavianus Sidarta

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
octavianus1724@gmail.com

Abstrak – Tujuan Akademis Penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan ini untuk menganalisis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh PT. GPI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT. GPI dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. IR mengetahui bahwa PT. GPI tidak memiliki kompetensi dan tenaga ahli Bioremediasi, namun IR menyalahgunakan kekuasaan dirinya sebagai Direktur untuk menerima pekerjaan Bioremediasi yang bertentangan dengan ketentuan KEPMEN 128/2003. Sesuai dengan teori pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, maka teori vikarius sangat tepat diterapkan didalam kasus PT. GPI karena di dalam teori vikarius tersebut korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai, direktur atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pertanggungjawaban Pidana

**MANAGEMENT OF HAZARDOUS WASTE AND TOXIC BY PT. GPI IN
TERMS OF ACT NUMBER 32 YEAR 2009 REGARDING TO
PROTECTION AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT**

Oktavianus Sidarta

Law Faculty of Universitas Surabaya
octavianus1724@gmail.com

***Abstract** - The Academic Purpose of this study was a requirement or graduation and obtaining a Bachelor of Law degree in the Law Faculty of Universitas Surabaya. The practical purpose of this study was to analyze the management of toxic and hazardous waste by PT. GPI viewed from the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. PT. GPI could be charged with criminal liability according to Article 55 paragraph (1) point 2 of the Criminal Code. IR knew that PT. GPI did not have the ability and bioremediation expert, but IR missed his power as the director to accept Bioremediation project with violated the provisions of KEPMEN 128/2003. According to the theory was appropriate to be applied in the case of PT. GPI because corporates may be held accountable for the actions committed by the employee, directors, or anyone in charge in the corporation.*

***Keywords:** Crime of Environmental Pollution, Toxic and Hazardous Waste Management, Criminal Liability.*

